

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 4



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Rri.co.id

# Pemprov Berikan Bantuan Sewa Warga Non-DKI sebesar Rp 1,5 juta

Oleh: Alwan Shaddam Editor: Aris Basuki

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan dana untuk sewa rumah kepada warga ber-KTP non-DKI. Kegiatan pemberian bantuan dana ini dihadiri langsung oleh Asisten Pemerintahan Jakarta Barat, Firmanudin Ibrahim dan Camat Grogol Petamburan, Agus Sulaeman.

Camat Grogol Petamburan, Agus Sulaeman mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membantu warga yang terdampak relokasi dan mereka yang membutuhkan bantuan sosial.

"Hari ini ada dua kegiatan yang kita lakukan secara paralel. Pertama, kita merelokasi sekitar 29 kepala keluarga ke Pik Pulogadung. Kedua, kita memberikan santunan kepada warga non-DKI atau mereka yang ber-KTP daerah," ujar Agus, Rabu (4/12/202).

Bantuan sosial yang diberikan mencakup uang sewa selama dua bulan sebesar Rp 1,5 juta dan paket sembako dari Dinas Sosial. Selain itu, warga yang ingin kembali ke kampung halaman akan difasilitasi oleh Dinas Sosial untuk pemberangkatan.

"Hari ini kurang lebih 98 kepala keluarga akan menerima uang sewa, sementara 20 kepala keluarga sedang dalam proses penerbitan identitas kependudukan," kata Agus.

Agus juga menegaskan bahwa warga yang memutuskan untuk kembali ke daerah asal tetap akan menerima uang sewa selama mereka tercatat dalam daftar kelurahan. "Kalaupun mereka nanti ternyata mau pulang kampung, mereka akan dikoordinir oleh Dinas Sosial untuk pemberangkatan ke daerah masing-masing," ujarnya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan Jakarta Barat, Firmanudin Ibrahim mengatakan dalam waktu dekat, masyarakat bisa segera dapat meninggalkan kolong tol Jelambar untuk mendapatkan tempat tinggal layak huni "Insyaallah mereka akan meninggalkan kolong jembatan dalam minggu ini. Jumat insyaallah bisa selesai," kata Firmanudin.

"Sehingga kolong tol tersebut yang bukan fungsinya untuk tempat tinggal, menjadi layak untuk kepentingan masyarakat dan bermanfaat untuk masyarakat," sambungnya.

Langkah ini merupakan upaya pemerintah setempat untuk memastikan hak-hak warga terdampak tetap terpenuhi, baik bagi yang direlokasi maupun yang kembali ke kampung halaman.